



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAMUS INDIKATOR SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI TAHUN 2016

Perpustakaan DPR R



13011208

320.03

SAT
k



KATA PENGANTAR

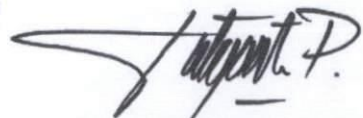
Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada praktiknya, penyusunan LAKIP mengalami kendala dalam pendataan target dan hasil kinerja. Terutama saat terjadi perpindahan (mutasi) pejabat dan pegawai yang berwenang dalam menyusun indikator kinerja di unit kerja yang bersangkutan. Unit kerja mengalami kesulitan dalam menerjemahkan target kinerja yang telah disusun.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Kamus Indikator yang berfungsi sebagai penjelasan beserta metode penghitungannya atas target kinerja yang telah disusun. Sehingga, siapapun yang berwenang dalam penyusunan LAKIP memiliki dasar yang sama dan jelas dalam menghitung kinerjanya.

Terbitnya Kamus Indikator diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Unit kerja akan memahami tujuan yang ingin dicapai/ditargetkan beserta caranya. Kamus Indikator akan membantu menciptakan sebuah sistem yang berkesinambungan guna mendukung anggaran berbasis kinerja.

PENANGGUNG JAWAB,



Satyanto Priambodo, SE, M.Si
NIP. 19661008 199403 1003



TIM PERUMUS

Pengarah

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si
Achmad Djuned, SH, M.Hum
K. Johnson Rajagukguk, SH, M.Hum
Dra. Damayanti, M.Si

Penanggung Jawab

Satyanto Priambodo, SE, M.Si

Ketua

Djoko Prihandono

Wakil Ketua

Dewi Pusporini, ST, ME

Sekretaris

Dewi Resmini, SE, M.Si

Anggota

Purwanto
Sudadi
Hedy Gunawan
Budhi Soekarjanto
Fransiskus Edy Santoso
Azmi Hidayati
Afriani Lahay
Pebri Tris Isti Astuti
Istiyono
Suryatna, S.IP
Taryono, S.IP
Dedy Bagus Prakasa, SE, M.Ak
Emi Muryani
Evi Rina Haijinah Fikri, SE
Rydelvi, SE
Harry Budhi Hartanto, SE
Setiawan Sardjuwurjanto
Pradanadi Saksesa Drimanda Ibrahim, S.Kom
Anggoro Agung Wijayanto, SE
Rozanna Indrawardani, SE
Niyanti Anggitasari, SE
Nur Miftahulyanah, SE
Saepul Amin, SE
Arifianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PERUMUS	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Definisi Istilah	3
1.4 Maksud dan Tujuan	5
BAB II Indikator Kinerja	6
2.1 Syarat dan Kriteria Indikator	6
2.2 Tipe dan Jenis Indikator	8
2.3 Penggunaan Indikator	8
2.4 Metoda Penghitungan Keluaran (<i>Output</i>)	9
Sekretariat Jenderal	10
Badan Keahlian	11
Deputi Bidang Persidangan	12
Deputi Bidang Administrasi	13
Inspektorat Utama	14
Biro Protokol I	15
Biro Protokol II	19
Biro Kerja Sama Antar Parlemen	23

Biro Kesekretariatan Pimpinan	25
Biro Pemberitaan Parlemen	30
Biro Protokol	32
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	34
Biro Kepegawaian dan Organisasi	38
Biro Perencanaan dan Keuangan	40
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	45
Biro Umum	48
Inspektorat I	53
Inspektorat II	54
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	55
Pusat Data dan Informasi	58
Pusat Perancangan Undang-Undang	59
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	60
Pusat Kajian Anggaran	62
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	63
Pusat Penelitian	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka

penerapan tata pemerintahan yang baik. Dukungan terhadap hal tersebut juga kerap dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAKIP yang dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Rencana Strategis K/L adalah dokumen Perencanaan anggaran dan kegiatan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, sedangkan Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dalam penyusunannya, baik Renstra ataupun PK disusun dengan mencantumkan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, serta indikator dan target kinerjanya.

Penyusunan indikator kinerja pada dokumen SAKIP secara formal dalam suatu lembaga pemerintah diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja sangat diperlukan agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi untuk mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Jika suatu organisasi tidak dapat mengukur apakah kegiatan dan program yang dijalankan berhasil atau mempunyai kinerja baik, maka organisasi juga tidak akan memahami kegiatan atau programnya sendiri. Secara lebih mendalam, jika suatu organisasi tidak dapat mengukur kinerjanya sendiri, maka organisasi tersebut tidak dapat mengetahui apakah kegiatan dan program yang dilaksanakan telah berhasil atau tidak berhasil dilaksanakan serta efisien atau tidak efisien dalam penggunaan sumber daya.

Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat penyusunan RKA K/L maka indikator kinerja setiap organisasi/instansi pemerintah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran. Oleh karena itu, perumusan indikator harus

memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang terkait.

Dalam pelaksanaannya perumusan indikator juga harus disertai dengan penjelasan indikator dan target kinerjanya, bagaimana indikator tersebut dihitung dan bagaimana pelaksanaan pencapaian target indikator tersebut. Dengan demikian dalam perumusan indikator kinerja dalam dokumen SAKIP perlu juga disertai dengan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan lebih detail mengenai indikator-indikator yang telah dirumuskan pada dokumen SAKIP, untuk itulah pembuatan kamus indikator kinerja dianggap perlu, untuk memfasilitasi dan sebagai dasar pelaksanaan indikator kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya.

1.3. Definisi Istilah

Dalam dokumen kamus indikator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi)
3. Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan program unit Eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
4. Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah unit organisasi Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program untuk Eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah penjabaran visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden.

8. Kebijakan K/L adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi, serta kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit K/L yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
12. Sasaran Strategis K/L (*Outcome*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
13. Sasaran Program (*Outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*).
14. Sasaran Kegiatan (*Output*) adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
15. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*).
16. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis K/L.
17. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
18. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.

19. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
20. Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan kamus indikator untuk indikator kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi pimpinan K/L, pimpinan eselon I, pimpinan eselon II, dan pelaksana kegiatan dalam menjabarkan indikator kinerja yang telah diamanatkan dokumen SAKIP dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja.
2. Menjadi acuan dalam proses penelaahan dokumen SAKIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan K/L lainnya yang melakukan penelaahan terhadap dokumen SAKIP.

BAB II INDIKATOR KINERJA

2.1. Syarat dan Kriteria Indikator

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Relevan**; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. **Penting/menjadi prioritas** dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.
3. **Efektif dan layak**; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. *Specific*;
2. *Measurable*;
3. *Achievable*;
4. *Relevant*;
5. *Time Bond*:

Specific, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Measurable atau dapat menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. Indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator. Tepat secara

operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk satu indikator.

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah “Berapa indikator kinerja yang harus digunakan untuk mengukur suatu keluaran (*output*)?”, jawabannya tergantung pada: kompleksitas *output* yang akan diukur; sumberdaya yang tersedia untuk memonitor kinerja; dan jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang memadai. Untuk hasil-hasil yang langsung dan mempunyai pengukuran yang benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup. Namun, apabila dengan satu indikator ternyata tidak cukup atau apabila ada manfaat yang dihasilkan dari pengukuran terhadap beberapa sudut, maka dua atau lebih indikator mungkin diperlukan.

Achievable atau dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi/instansi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi yang bersangkutan atau tidak.

Relevant, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur. Misalnya ‘jumlah dokumen perencanaan’ adalah ukuran langsung dari suatu *output* Dokumen Perencanaan dan keuangan sedangkan ‘Jumlah SDM yang profesional’ bukanlah ukuran langsung dari suatu *output* Dokumen Perencanaan dan Keuangan, karena profesionalitas SDM tidak berarti secara otomatis akan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari dokumen perencanaan dan keuangan yang dihasilkan.

Time Bond, waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan, yaitu indikator kinerja yang disusun memiliki target waktu yang jelas. Kapan kegiatan tersebut harus selesai. Apakah bulan pertama, ataukah bulan ke dua. Target waktu juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan keuangan harus selesai pada tiap tahunnya/tiap triwulannya atau kapan proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

2.2. Tipe dan Jenis Indikator

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

1. Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)
3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%)
4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
5. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks pembangunan manusia)

Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Renja (Bappenas), aplikasi RKAKL, dan Perjanjian Kinerja (PK) harus selaras (sinkron) sehingga terdapat keseragaman sumber data saat ingin menyusun berbagai laporan seperti e-Monev, Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEPRA), dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Aplikasi RKAKL Kementerian Keuangan hanya mengakomodir 1 (satu) jenis keluaran (*output*) sehingga untuk tahun 2017 dan berikutnya, hanya ada satu jenis keluaran (*output*) yang akan diakomodasi. Sebagai contoh, di Pusat Perancangan Undang-Undang terdapat *output* “dokumen” dan “Naskah Akademik”. Maka, di tahun 2017, satuan “Naskah Akademik” akan dirubah menjadi “dokumen”

2.3. Penggunaan Indikator

Seiring dengan gelombang menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalam buku ini disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), maupun setelahnya (*ex-post*). Dengan adanya informasi tersebut, organisasi

dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

2.4. Metode Penghitungan Keluaran (*Output*)

Setiap unit kerja memiliki karakteristik/keunikan sehingga dalam penghitungan keluaran (*output*) disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Setiap *output* yang dihasilkan harus dapat menggambarkan hasil akhir dari suatu kegiatan. Adapun metode yang digunakan dalam penghitungan keluaran (*output*) di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut:

a. Hasil Akhir

Kinerja dihitung berdasarkan hasil akhir dan proses pembentukan dokumen tidak termasuk ke dalam *output*.

Sebagai contoh, dalam pembuatan Renstra/Naskah Akademik/Kajian, baru dapat dihitung sebagai *output* setelah Renstra/Naskah Akademik/Kajian selesai. Adapun dokumen lain yang dihasilkan selama proses pembuatan Renstra/Naskah Akademik/Kajian tidak dihitung sebagai hasil (*output*).

b. Rekapitulasi

Kinerja dihitung berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun. Metode rekapitulasi memudahkan unit kerja dalam menyusun laporan kinerja.

Sebagai contoh, dalam penyusunan laporan kinerja dalam Masa Persidangan I, *output* merupakan rekapitulasi dari dokumen-dokumen yang dihasilkan (laporan singkat, rapat-rapat, undangan, dan lain-lain) selama masa persidangan tersebut untuk kegiatan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

c. Pengelompokan (*Clustering*)

Kinerja dihitung berdasarkan pengelompokan (*clustering*) selama tahun untuk memudahkan unit kerja dalam menyusun *output* dari lingkup pekerjaan yang sangat beragam. Sebagai contoh, di Biro Pengelolaan BMN terdapat pekerjaan pengadaan/pemeliharaan alat pendingin, pengadaan/pemeliharaan alat kelistrikan, pemeliharaan instalasi listrik, air, telepon, dan lain-lain. Untuk memudahkan Biro Pengelolaan BMN dalam menyusun *output*, maka selama satu tahun, kinerjanya dikelompokkan menjadi Pengadaan dan Pemeliharaan Mekanikal, dan Pengadaan dan Pemeliharaan Elektrikal.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Anggaran : Rp1.751.072.453.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI	100%	$\frac{\Sigma \text{Materi Persidangan yang digunakan}}{\Sigma \text{Materi Persidangan yang disiapkan}}$ 100%
Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP	100%	$\frac{\Sigma \text{Upacara Kenegaraan yang sesuai SOP}}{\Sigma \text{Upacara Kenegaraan yang dilaksanakan}}$ 100%
Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT	90%	$\frac{\Sigma \text{unit kerja (eselon II) yang menerapkan IT dalam operasional kerjanya}}{\Sigma \text{unit kerja (eselon II) di lingkungan Setjen dan BKD}}$ 100%
Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	60%	Metode Survei

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Program

Anggaran : Rp39.478.555.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Persentase Naskah Akademik, Draft RUU, dan Keterangan DPR RI untuk Sidang Pengujian UU di MK yang digunakan oleh DPR RI	100%	$\frac{\sum \text{NA, Draft RUU, dan Keterangan DPR RI untuk Sidang Pengujian UU di MK yang digunakan oleh DPR RI}}{\sum \text{NA, Draft RUU, dan Keterangan DPR RI untuk Sidang Pengujian UU di MK yang dihasilkan}} \times 100\%$
Tingkat kepuasan pengguna layanan	60%	Metode Survei

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Anggaran : Rp246.858.625.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Persentase materi persidangan Komisi-komisi, Pansus, dan Paripurna yang digunakan oleh DPR RI	100%	$\frac{\Sigma \text{Materi Persidangan yang digunakan}}{\Sigma \text{Materi Persidangan yang disiapkan}}$ 100%
Persentase materi persidangan Badan-badan dan Mahkamah Kehormatan Dewan yang digunakan oleh DPR RI	100%	$\frac{\Sigma \text{Materi Persidangan yang digunakan}}{\Sigma \text{Materi Persidangan yang disiapkan}}$ 100%
Persentase materi persidangan Pimpinan yang digunakan oleh Pimpinan DPR RI	100%	$\frac{\Sigma \text{Materi Persidangan yang digunakan}}{\Sigma \text{Materi Persidangan yang disiapkan}}$ 100%

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Anggaran : Rp1.458.277.593.000,-

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Anggaran : Rp5.237.311.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	$\frac{\Sigma \text{hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ittama}} \times 100\%$

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5781 Persidangan Komisi dan Paripurna Kegiatan

Anggaran : Rp8.304.102.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Persidangan I	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Materi Persidangan Komisi I – XI	165 materi	1. Laporan Pelaksanaan Fungsi Legislasi (per masa persidangan Komisi I – XI) 2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Anggaran (per masa persidangan Komisi I – XI) 3. Laporan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (per masa persidangan Komisi I – XI)	- Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi - Jumlah masa persidangan x Jumlah fungsi DPR x Jumlah Komisi = 5 x 3 x 11 = 165.
Jumlah Persidangan Paripurna	35 kali	Laporan Persidangan Paripurna	Kinerja dihitung berdasarkan metode Rekapitulasi. Tahun 2017, satuan “kali” akan dirubah menjadi “dokumen”.

Satker Dewan

Kode dan Nomenklatur : 002.02.10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
Program

Kode dan Nomenklatur : 5801 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
Kegiatan : 5802 Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI
5803 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Anggaran : Rp519.176.668.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Rancangan Undang-Undang	39 RUU	1. Komisi I = 4 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah, 2 RUU Kumulatif Terbuka); 2. Komisi II = 12 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah, 10 RUU Pemekaran Wilayah); 3. Komisi III = 4 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah, 2 RUU Kumulatif Terbuka); 4. Komisi IV = 2 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah) 5. Komisi V = 2 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah) 6. Komisi VI = 3 RUU (2 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah) 7. Komisi VII = 3 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		Pemerintah, 1 RUU Kumulatif Terbuka) 8. Komisi VIII = 3 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah, 1 RUU Kumulatif Terbuka) 9. Komisi IX = 2 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah) 10. Komisi X = 2 RUU (2 RUU Usul DPR) 11. Komisi XI = 2 RUU (1 RUU Usul DPR, 1 RUU Usul Pemerintah)	
Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	113 Mitra Kerja	1. Komisi I = 16 Mitra 2. Komisi II = 13 Mitra 3. Komisi III = 15 Mitra 4. Komisi IV = 5 Mitra 5. Komisi V = 7 Mitra 6. Komisi VI = 11 Mitra 7. Komisi VII = 15 Mitra 8. Komisi VIII = 7 Mitra 9. Komisi IX = 7 Mitra 10. Komisi X = 6 Mitra 11. Komisi XI = 11 Mitra	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi dengan merekapitulasi dokumen yang dihasilkan selama pembahasan dengan mitra kerja
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah	11 rekomendasi	Komisi I – XI masing-masing mengeluarkan satu rekomendasi (11 rekomendasi).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi dengan merekapitulasi dokumen yang dihasilkan selama pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Layanan Fit & Proper Test	17 pertimbangan	1. Komisi I = 3 pertimbangan 2. Komisi III = 5 pertimbangan 3. Komisi VI = 2 pertimbangan 4. Komisi VII = 1 pertimbangan 5. Komisi VIII = 1 pertimbangan 6. Komisi XI = 5 pertimbangan	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Rekomendasi Penanganan Kasus-Kasus Spesifik	11 rekomendasi	Komisi I – XI = 11 rekomendasi	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi dengan merekapitulasi dokumen yang dihasilkan dalam penanganan kasus-kasus spesifik.

Satker Setjen

Kode dan : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas
Nomenklatur Program Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan : 5782 Persidangan Badan dan Mahkamah
Nomenklatur Kegiatan

Anggaran : Rp2.976.234.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Persidangan II	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Materi Persidangan Badan Legislasi	15 materi	1. Laporan Materi Penyusunan RUU Usul DPR (per masa persidangan) 2. Laporan Materi RUU Usul Pemerintah (per masa persidangan) 3. Laporan Materi RUU Usul Perorangan (per masa persidangan)	- Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi. - Jumlah masa persidangan x jenis RUU = 5 x 3 = 15.
Jumlah Materi Persidangan Badan Anggaran	6 materi	1. Laporan Materi Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2017 2. Laporan Materi Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN TA 2016 3. Laporan Materi Pembahasan RUU	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Kinerja sekretariat Badan Anggaran selama 1 (satu) tahun dikelompokkan berdasarkan siklus APBN.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		tentang APBN-P TA 2016 4. Laporan Materi Pembahasan tentang APBN TA 2017 5. Laporan Materi Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015. 6. Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran, meliputi antara lain Laporan Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Laporan RDP/RDPU.	
Jumlah Materi Persidangan BURT	5 materi	Laporan Materi Kegiatan BURT (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Panitia Khusus	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Panitia Khusus (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.

Satker Dewan

Kode dan Nomenklatur : 002.02.10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI (Satker Dewan)

Kode dan Nomenklatur : 5801 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
 Kegiatan : 5802 Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI
 5804 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI

Anggaran : Rp179.366.945.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan Badan Legislasi dan Pansus	9 RUU	Badan Legislasi dan Pansus	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah RUU Perorangan Anggota DPR	25 RUU	Penyusunan RUU oleh Perorangan Anggota DPR RI	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Dokumen hasil penetapan Program Legislasi Nasional	1 Prolegnas	Penetapan Prolegnas	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah RUU Harmonisasi Undang-Undang oleh Baleg	10 RUU	Jumlah RUU yang diharmonisasi oleh Badan Legislasi	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah RUU Pembahasan, Pengubahan dan/atau Penyempurnaan RUU	1 RUU	Jumlah RUU yang disempurnakan oleh Badan Legislasi	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Laporan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang oleh Anggota DPR RI	2 Laporan	Jumlah kegiatan Sosialisasi UU yang dilaksanakan oleh Anggota DPR pada masa reses	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah UU Hasil Pemantauan, Peninjauan, dan Penyebarluasan Undang-Undang oleh Baleg	3 UU	Jumlah UU yang Dipantau, Ditinjau, dan Disebarluaskan oleh Baleg	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Peraturan DPR yang disahkan	4 Peraturan DPR	Jumlah Peraturan DPR yang disahkan	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Pengesahan RUU RAPBN, APBN-P, dan Pertanggung Jawaban APBN	3 RUU	Pengesahan RUU APBN	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Kebijakan/Keputusan Kerumahtanggaan DPR RI	15 Keputusan	Jumlah dokumen BURT yang meliputi bidang kerja: 1. Pelaksanaan Tugas Bidang Kerja BURT dikali 5 masa sidang 2. Penguatan Pelaksanaan Tugas BURT dikali 5 masa sidang 3. Dukungan Tugas BURT dikali 5 masa sidang	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Kinerja BURT dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang kerja yaitu Pelaksanaan, Penguatan, dan Dukungan Tugas BURT
Jumlah perkara yang diputuskan oleh MKD	8 Perkara	Jumlah perkara yang diputuskan oleh MKD	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Nomenklatur Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan : 5783 Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen
Nomenklatur
Kegiatan

Anggaran : Rp1.333.856.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Kerja Sama Antar Parlemen	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional	5 materi	Laporan Materi Kegiatan KSOI (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional	5 materi	Laporan Materi Kegiatan KSOR (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral	5 materi	Laporan Materi Kegiatan KSB (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Minluna (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.

Satker Dewan

Kode dan : 002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
Nomenklatur
Program

Kode dan : 5801 Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama
Nomenklatur Internasional
Kegiatan

Anggaran : Rp157.915.572.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Sidang Konferensi di Dalam Negeri	3 kali	Sidang/Konferensi yang rencananya akan diselenggarakan di dalam negeri antara lain: 1. Parliamentary Forum on Democracy di Bali 2. Global Green Growth Parliamentarians di Jakarta 3. Asian Parliamentary Assembly Standing Committee di Jakarta	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Pengembangan Hubungan Kerja Sama Luar Negeri	50 kali	1. Organisasi Parlemen Internasional (16 kali) 2. Organisasi Parlemen Regional (15 kali) 3. Desk Kerja Sama Bilateral (18 kali) 4. Kunker LN Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi parlemen (1 kali)	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir. Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5784 Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan
Kegiatan

Anggaran : Rp11.240.711.000,00

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Kesekretariatan Pimpinan	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Materi Persidangan Ketua DPR RI	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Ketua DPR RI (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Kesejahteraan Rakyat			
Jumlah Materi Persidangan Badan Musyawarah	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Badan Musyawarah (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Musyawarah Pimpinan	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Musyawarah Pimpinan (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Materi Persidangan Pimpinan Sekretariat Jenderal	5 materi	Laporan Materi Kegiatan Pimpinan Sekretariat Jenderal (per masa persidangan)	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Dokumen Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap	2 dokumen	1. Laporan administrasi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi (SA); dan 2. Laporan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT).	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Dewan

Kode dan : 002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
Nomenklatur Program

Kode dan : 5803 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI
Nomenklatur Kegiatan 5804 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI

Anggaran : Rp139.224.143.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah	9 Rekomendasi	1. Laporan 3 Pansus non RUU 2. Laporan 6 Tim DPR RI yang dibentuk berdasarkan SK Pimpinan DPR, yaitu: a. Tim dalam rangka pengawasan terhadap Penanggulangan Bencana Alam/Tragedi Kemanusiaan b. Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU. No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU. No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua c. Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		d. Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia e. Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI f. Tim Implementasi Reformasi DPR RI	
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Ketua DPR RI	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua DPR RI (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikelurkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
RI Bidang Kesejahteraan Rakyat		Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (per masa persidangan).	
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Badan Musyawarah	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Musyawarah (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan Musyawarah Pimpinan	5 keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Musyawarah Pimpinan (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi
Jumlah Keputusan yang dikeluarkan dalam Pelaksanaan tugas Pimpinan lainnya	5 Keputusan	Laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Pimpinan lainnya (per masa persidangan).	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5785 Pemberitaan Parlemen Kegiatan

Anggaran : Rp223.003.722.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Pemberitaan Parlemen	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi DPR RI di Media Cetak dan Media Sosial	4 dokumen	1. Blocking untuk media cetak 2. Blocking untuk media online 3. Analisis Media 4. Materi Majalah dan Buletin Parlementaria	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Secara rinci terdapat 13.275 laporan yang dikelompokkan menjadi 4 dokumen besar.
Jumlah Dokumen Pengelolaan Penerangan dan Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	1. Penerangan ke publik 2. Sosialisasi kegiatan fungsi DPR RI 3. Pelayanan Informasi Publik (PIP) 4. Bakohumas	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Secara rinci terdapat 196 laporan yang dikelompokkan menjadi 4 dokumen besar.
Jumlah Dokumen Pengelolaan Penayangan Televisi dan Radio Parlemen	3 dokumen	1. Program dan produksi siaran TV 2. Program dan produksi siaran radio 3. Teknis TV	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Secara rinci terdapat 389 laporan yang dikelompokkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
			menjadi 3 dokumen besar.
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penerbitan	2 dokumen	1. Dokumen Penerbitan 2. Dokumen Distribusi Penerbitan	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5786 Penyelenggaraan Keprotokolan Kegiatan

Anggaran : Rp23.915.538.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Protokol	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Penyelenggaraan Acara Parlemen dan Kesetjengan	5 dokumen	1. Laporan Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Delegasi Luar Negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai Tamu Resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta 2. Laporan Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Delegasi Parlemen	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

		Luar Negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai Tamu Resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah	
		3. Laporan Penyelenggaraan	

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		Penerimaan Tamu Delegasi Sekretariat Parlemen Luar Negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai Tamu Resmi Pimpinan Setjen DPR RI di Jakarta 4. Laporan Pengurusan VIP Room 5. Laporan Peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Protokol DPR RI	
Jumlah Penyelenggaraan Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat	7 dokumen	1. Laporan Rapat Paripurna DPR RI Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN 2016 2. Laporan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI tanggal 16 Agustus 2016 3. Laporan Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 29 Agustus 2016 4. Laporan Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat DPR 5. Laporan Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI 6. Laporan Penyaluran Delegasi Masyarakat 7. Laporan Kegiatan Protokoler Lainnya	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Setjen

Kode dan : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas
Nomenklatur Program Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan : 5787 Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan
Nomenklatur Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Anggaran : Rp2.858.305.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Perumusan Produk Hukum, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	13 dokumen	1. Laporan kegiatan pertimbangan dan kajian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi DPR 2. Laporan penanganan perkara perdata/tata usaha negara yang ditujukan kepada DPR/Pimpinan DPR/AKD dan penanganan perkara hukum di luar pengadilan 3. Laporan penanganan perkara perdata/tata usaha negara yang ditujukan kepada	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		Setjen DPR RI dan penanganan perkara hukum di luar pengadilan 4. Laporan Penyusunan Surat Keputusan DPR RI maupun Pimpinan DPR RI 5. Laporan pertimbangan terhadap konsep perjanjian/MoU DPR RI 6. Laporan penyusunan Surat Keputusan Sekjen, Surat Keputusan KPA/B, Instruksi Sekjen, Surat Edaran 7. Laporan penyusunan Persekjen DPR RI 8. Laporan Evaluasi Persekjen DPR RI 9. Laporan pertimbangan terhadap konsep perjanjian/MoU Setjen DPR RI 10. Laporan pengadministrasian produk hukum DPR RI dan Setjen DPR RI 11. Laporan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada DPR RI dan Setjen DPR RI 12. Laporan kegiatan pertimbangan hukum dan kajian hukum terhadap permasalahan-	

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		permasalahan yang dihadapi DPR RI 13. Laporan entry status peraturan perundang-undangan	
Jumlah Analisis Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	3 dokumen	1. Laporan surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI 2. Laporan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi/Badan 3. Laporan surat pengaduan yang disampaikan melalui Website dan SMS kepada DPR RI	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Dewan

Kode dan : 002.02.10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
Nomenklatur Program

Kode dan : 5801 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
Nomenklatur
Kegiatan

Anggaran : Rp1.351.747.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI.	6 Perkara	Laporan penanganan perkara di dalam dan di luar Pengadilan.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5788 Pengelolaan SDM dan Organisasi
Kegiatan

Anggaran : Rp44.119502.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Kepegawaian dan Organisasi	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 dokumen	1. Formasi dan Mutasi Pegawai (33 dokumen) 2. Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai (34 dokumen) 3. Kesejahteraan Pegawai (33 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	8 dokumen	1. Dokumen Surat Keputusan (4 dokumen) 2. Dokumen Pengurusan PAW 3. Dokumen Pengurusan Pensiun Anggota 4. Dokumen Pengurusan Janda/Duda 5. Dokumen Pengurusan Jenazah	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	8 dokumen	1. Dokumen Tata Naskah Dinas Setjen DPR RI 2. Dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) 3. Dokumen Peta Proses Bisnis Setjen DPR RI 4. Dokumen Standar Kompetensi 5. Dokumen Analisa Jabatan 6. Dokumen Evaluasi Jabatan 7. Dokumen Analisa Beban Kerja 8. Dokumen Pembentukan Jabatan Fungsional	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Layanan Kesehatan yang Sesuai Standar	11 layanan	1. Spesialis Anak 2. Spesialis Jantung 3. Spesialis Mata 4. Spesialis Internis 5. Kesehatan Jiwa 6. Spesialis Neurologi 7. Spesialis Kebidanan dan Kandungan 8. Spesialis THT 9. Ahli Gizi 10. Patologi 11. Apoteker	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Layanan Perkantoran	12 Bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline	

Satker Setjen

Kode dan : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas
Nomenklatur Program Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan : 5789 Perumusan Perencanaan dan Keuangan
Nomenklatur Kegiatan

Anggaran : Rp286.155.744.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Dokumen Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Perencanaan	16 dokumen	1. Rencana Kerja Pemerintah 2. Rencana Kinerja Tahunan 3. Perjanjian Kinerja 4. RKA Usulan Satker Setjen 5. RKA Usulan Satker Dewan 6. Nojel RKA Usulan 7. RKA Pagu Indikatif Satker Setjen 8. RKA Pagu Indikatif Satker Dewan 9. Nojel RKA Pagu Indikatif 10. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen 11. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		12. Nojel RKA Pagu Anggaran 13. RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen 14. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan 15. Nojel RKA Alokasi Anggaran 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	36 dokumen	1. Laporan Realisasi Triwulan 1 (1 dokumen) 2. Laporan Realisasi Triwulan 2 (1 dokumen) 3. Laporan Realisasi Triwulan 3 (1 dokumen) 4. Laporan Realisasi Triwulan 4 (1 dokumen) 5. Revisi Satker Setjen (7 dokumen) 6. Revisi Satker Dewan (7 dokumen) 7. Laporan Triwulan 1 (1 dokumen) 8. Laporan Semester 1 (1 dokumen) 9. Laporan Triwulan 3 (1 dokumen) 10. Laporan Tahunan Anaudited (1 dokumen) 11. Laporan Tahunan Audited (1 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		12. Laporan Bulanan (12 dokumen) 13. Laporan Monitoring dan Evaluasi (1 dokumen)	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Anggaran	13 dokumen	1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Dewan 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Setjen 3. LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen 4. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker Dewan 5. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker Setjen 6. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker Setjen 7. Laporan Perpajakan Satker Dewan 8. Laporan Perpajakan Satker Setjen 9. Kartu Pengawas Transaksi GU dan LS Satker Dewan 10. Kartu Pengawas Transaksi GU dan LS Satker Setjen	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Secara rinci terdapat 672 laporan yang terakumulasi menjadi 13 dokumen besar.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		11. Laporan Realisasi SPM Satker Dewan 12. Laporan Realisasi SPM Satker Setjen 13. Laporan Tunjangan-tunjangan Anggota	
Jumlah Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas	4 dokumen	1. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan 2. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Setjen 3. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Dewan 4. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Setjen	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Secara rinci terdapat 2.131 laporan yang terakumulasi menjadi 4 dokumen besar.
Layanan Perkantoran	12 Bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline	

Satker Dewan

Kode dan Nomenklatur : 002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
Program

Kode dan Nomenklatur : 5803 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI
Kegiatan

5806 Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

5807 Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan

Anggaran : Rp2.346.103.233.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Dokumen Penanganan Kasus-Kasus Spesifik Perorangan Anggota/Inspeksi Mendadak	1 Rekomendasi	Rekomendasi Hasil Penanganan Kasus Spesifik.	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Jumlah Laporan kunjungan kerja diluar masa reses dan diluar sidang DPR, dan pada masa reses	77 Daerah Pemilihan	Daerah pemilihan yang dikunjungi dalam rangka menyerap aspirasi dari konstituen	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> berdasarkan jumlah daerah pemilihan (Dapil)
Terlaksananya Dukungan Administrasi dan Keuangan Dewan	95%	Persentase Pembayaran Dukungan Administrasi dan Keuangan	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.
Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline untuk pembayarn gaji dan tunjangan	

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5790 Pengelolaan Barang Milik Negara Kegiatan

Anggaran : Rp923.088.295.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Laporan Barang Milik Negara	10 dokumen	1. Laporan Tahunan 2. Laporan Audit BMN Tingkat Satker 3. Laporan Audit BMN Tingkat Lembaga 4. Laporan Audit BMN Tingkat Eselon 5. Laporan Semester 1 Tingkat Satker 6. Laporan Semester 1 Tingkat Lembaga 7. Laporan Semester 1 Tingkat Eselon 8. Laporan Semester 2 Tingkat Satker 9. Laporan Semester 2 Tingkat Lembaga 10. Laporan Semester 2 Tingkat Eselon	Kinerja dihitung menggunakan metode Rekapitulasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung	4 dokumen	1. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung 2. Perawatan dan Pemeliharaan Taman 3. Perawatan dan Pemeliharaan Mekanikal 4. Perawatan dan Pemeliharaan Elektrikal	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Jabatan	3 dokumen	1. RJA Kalibata 2. RJA Ulujami 3. Rumah Dinas Pimpinan	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Pengelolaan Wisma DPR RI	2 dokumen	1. Pengelolaan Wisma 2. Pelayanan Wisma	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Layanan Perkantoran	12 bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline	

Satker Dewan

Kode dan Nomenklatur : 002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
Program

Kode dan Nomenklatur : 5806 Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi
Kegiatan Masyarakat

Anggaran : Rp84.000.000.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Rumah Aspirasi Anggota DPR	77 Daerah Pemilihan	Jumlah pembentukan rumah aspirasi.	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> berdasarkan jumlah daerah pemilihan (Dapil)

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5791 Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Kegiatan

Anggaran : Rp178.140.209.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Biro Umum	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Biro.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan	370 dokumen	Dokumen pengadaan	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Persuratan dan Penyimpanan	6 dokumen	1. Surat Masuk Satker Setjen dan BKD 2. Surat Keluar Satker Setjen dan BKD 3. Surat Masuk Satker Dewan 4. Surat Keluar Satker Dewan 5. Surat Permintaan ATK 6. Surat Permintaan ARTK	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Layanan Kendaraan Dinas	2 dokumen	1. Pengadaan langsung 2. Pengadaan e-katalog	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Pengamanan Dalam	20 dokumen	1. Dokumen administrasi pamdal dalam rangka penertiban intern dan keamanan	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		2. Dokumen kontrak peningkatan sarana dan prasarana keamanan	
Layanan Perkantoran	12 bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline.	
Jumlah Unit Kendaraan	32 unit	Pengadaan tersebut terdiri atas: 1. Ambulance lengkap dengan alat kesehatan (1 unit) 2. Bus Sedang untuk Operasional Dewan (3 unit) 3. Bus Sedang untuk Operasional Setjen (2 unit) 4. Kendaraan Dinas Eselon II (5 unit) 5. Sepeda Motor (20 unit)	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Jenis Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22 unit	Pengadaan tersebut terdiri atas: 1. Pengadaan Anti Virus 2. Pengadaan PC lengkap 3. Pengadaan Notebook/Laptop 4. Pengadaan Notebook/Laptop spesifikasi khusus untuk Biro Pemberitaan Parlemen 5. Pengadaan scanner ukuran A3 kecepatan tinggi 6. Multimedia Proyektor Ruang Rapat 7. Printer Laserjet Monochrome 8. Printer Laserjet Warna 9. Printer akses ID Card 10. Monitor Komputer	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i>. - Jumlah unit tidak menunjukkan jumlah barang, namun menunjukkan jenis barang (PC lengkap, Notebook, dan lain-lain). - Jenis alat kerja merupakan estimasi dan dapat berubah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		11. Hardisk Eksternal 1 TB 12. Digital Voice Recorder 13. Pengadaan alat i-perisalah portable 14. Mesin fotocopy berwarna kecepatan standar 15. Mesin fotocopy kecepatan tinggi lengkap dengan alat sortir 16. Mesin fotocopy berwarna kecepatan tinggi dengan alat sortir 17. Mesin faximile thermal 18. Pengadaan <i>car call system</i> 19. PC Spesifikasi khusus untuk TV Parlemen 20. Pengadaan scanner untuk Perpustakaan 21. Pengadaan standing TV untuk pameran perpustakaan 22. Pengadaan RFID	
Jumlah Jenis Peralatan Perkantoran	53 unit	Pengadaan tersebut terdiri atas: 1. Pengadaan AC Split 2. Pengadaan TV 3. Tape recorder kecil 4. Mesin penyerap kelembaban udara 5. Mesin penghancur kertas 6. Dispenser 7. Lemari Es 8. <i>Coffee maker</i> 9. <i>Handycam</i>	- Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> . - Jumlah unit tidak menunjukkan jumlah barang, namun menunjukkan jenis barang (meubelair, dan lain-lain). - Jenis alat kantor merupakan estimasi dan dapat berubah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		10. Kamera digital 11. Heckmachine 12. Kamera DSLR dan kit standar 13. Kalkulator 16 digit 14. Kalkulator dengan alat cetak (<i>printing</i>) 15. Kompor listrik induksi 16. Lampu darurat (<i>emergency lamp</i>) 17. Mesin tik elektrik 17 inch 18. Jam dinding 19. Portable meeting amplifier 20. Paket <i>sound system</i> 21. Papan pengumuman madding 22. Gerobak dorong/ <i>handtrolley</i> 500 kg 23. Trolley keranjang/ <i>meshride</i> 24. Lemari roll opect mekanik 25. Pengadaan dokumen feeder (<i>scanner</i>) 26. Meja kerja Pimpinan AKD 27. Kursi kerja Pimpinan AKD 28. Prisma nama kayu ukir Pimpinan AKD 29. Kursi kerja pegawai 30. Kursi hadap 31. Kursi dan meja tamu 32. Kursi lipat 33. Kursi susun 34. Meja kerja setengah Biro	

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		35. Rak besi dengan back and side panel 36. Lemari kaca pintu sorok 37. Tempat tidur kayu lengkap 38. Filling cabinet 39. Meja rapat 40. Therapy examination bed 41. Meja dan kursi untuk layanan kesehatan 42. Echo Cardiography 43. Treadmill plus EKG 44. DC Shock Portable 45. Sound Prof Chamber 46. Alat untuk Pemeriksaan Elektrolit Darah 47. MWD 2 Tangkai 48. Elektrikal Stimulasi 49. Ultra Sonic Nebulizer 50. Ultra Sonic Therapy 51. TENS 52. Pembelian alat kesehatan kecil 53. Pembelian Sarana Penunjang Kesehatan	

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5792 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Kegiatan Aparatur oleh Inspektorat I

Anggaran : Rp2.557.104.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat I	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Irtu.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Laporan hasil audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat I.	5 dokumen	1. Laporan Audit 2. Laporan Reviu 3. Laporan Pemantauan 4. Laporan Evaluasi 5. Laporan Pengawasan Lainnya	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5793 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Kegiatan Aparatur oleh Inspektorat II

Anggaran : Rp2.680.207.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat Utama	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Irtama.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat II	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Irda.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Laporan hasil audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya pada lingkup Inspektorat II.	5 dokumen	1. Laporan Audit 2. Laporan Reuiu 3. Laporan Pemantauan 4. Laporan Evaluasi 5. Laporan Pengawasan Lainnya	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5794 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan

Anggaran : Rp8.995.578.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	8 dokumen	1. Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Prajabatan dan Dalam Jabatan (3 dokumen) 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Lainnya (1 dokumen) 3. Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Persiapan Ujian Dinas (1 dokumen) 4. Dokumen Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis (1 dokumen) 5. Dokumen Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Fungsional (1 dokumen) 6. Dokumen <i>Grand Design</i> (1 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	22 dokumen	1. Dokumen Pelaksanaan Diklat Teknis (14 dokumen) 2. Dokumen Pelaksanaan Diklat Prajabatan (1 dokumen) 3. Dokumen Pelaksanaan Diklat Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah (1 dokumen) 4. Dokumen Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (1 dokumen) 5. Dokumen Pelaksanaan Diklat Fungsional (1 dokumen) 6. Dokumen Pelaksanaan Diklat Grand Design (1 dokumen) 7. Dokumen Pemberian Beasiswa Tugas Belajar (1 dokumen) 8. Dokumen Pemberian Ijin Belajar (1 dokumen) 9. Dokumen Pelaksanaan Program Pengembangan Lain (Diklat/Workshop/Seminar/Sosialisasi) (1 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .
Jumlah Dokumen Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	15 dokumen	1. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Prajabatan (1 dokumen) 2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah (1 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> .

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
		3. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (1 dokumen) 4. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Teknis (1 dokumen) 5. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Fungsional (1 dokumen) 6. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Grand Design (1 dokumen) 7. Dokumen Evaluasi Pemberian Beasiswa Tugas Belajar (1 dokumen) 8. Dokumen Evaluasi Pemberian Ijin Belajar (1 dokumen) 9. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Lain (Diklat/ Workshop/Seminar/So sialisasi) (1 dokumen) 10. Dokumen Evaluasi Perencanaan Diklat (4 dokumen) 11. Dokumen monitoring kegiatan perencanaan (1 dokumen) 12. Dokumen evaluasi kegiatan perencanaan (1 dokumen)	

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

Kode dan Nomenklatur : 5795 Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan

Anggaran : Rp31.703.346.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Data dan Informasi	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Referensi Kepustakaan	42 dokumen	1. Kliping Per Isu (14 dokumen) 2. Referensi RUU (14 dokumen) 3. Kliping Umum (14 dokumen)	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i>
Jumlah Data dan Teknologi Informasi Yang Dikelola	63 dokumen	Dokumen pengelolaan 63 aplikasi	Kinerja dihitung menggunakan metode <i>Clustering</i> atas pengelolaan 63 aplikasi.
Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip dan Museum	350 dokumen	Dokumen arsip dan museum	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Risalah Persidangan Rapat	750 dokumen	Dokumen risalah	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Penyelenggaraan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan	12 bulan	Merupakan kegiatan rutin/baseline.	

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Program

Kode dan Nomenklatur : 5796 Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan

Anggaran : Rp11.771.508.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Kepala Badan	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Kepala Badan.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Perancangan Undang-Undang	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Konsep Awal NA, Draft RUU, dan Peraturan Lainnya	20 dokumen	1. Konsep awal Naskah Akademik 2. Draft RUU 3. Peraturan Lainnya.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Program

Kode dan Nomenklatur : 5797 Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Kegiatan

Anggaran : Rp4.008.068.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Kajian pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, evaluasi Undang-Undang, dan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	14 dokumen	1. Kajian pemantauan pelaksanaan Undang-Undang 2. Kajian Evaluasi Undang-Undang 3. Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Dewan

Kode dan Nomenklatur : 002.02.10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
Program

Kode dan Nomenklatur : 5801 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
Kegiatan

Anggaran : Rp5.606.380.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	50 Perkara	Dokumen Keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Program

Kode dan Nomenklatur : 5798 Penyusunan Kajian APBN
Kegiatan

Anggaran : Rp4.696.465.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Analisis/Referensi/ Laporan tentang APBN	50 dokumen	Dokumen analisis/referensi/laporan tentang APBN.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
Program

Kode dan Nomenklatur : 5799 Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan
Kegiatan Negara

Anggaran : Rp3.120.450.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Analisis/Referensi/ Laporan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L	21 dokumen	Dokumen analisis/referensi/laporan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Program

Kode dan Nomenklatur : 5800 Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kegiatan

Anggaran : Rp15.882.064.000,-

INDIKATOR KINERJA	TARGET	RINCIAN	KETERANGAN
Jumlah Bahan Kebijakan Pusat Penelitian	4 dokumen	1. Renstra 2. Rencana Kerja dan Anggaran 3. LAKIP 4. Kebijakan-kebijakan Pusat.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.
Jumlah Dokumen Penelitian dan Analisis tentang Kedewanan	137 dokumen	Dokumen Penelitian dan Analisis tentang Kedewanan.	Kinerja dihitung menggunakan metode Hasil Akhir.